

PERBANDINGAN IMPLEMENTASI DAN REGULASI KELEMBAGAAN KEUANGAN SYARIAH MALAYSIA-THAILAND SERTA IMPLIKASINYA BAGI INDONESIA

Muhammad Rizka Ramadhani^{1*}, Naufal Luthfi Alifa²

¹ Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon

² Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon

INFO ARTIKEL

Artikel History:

Diterima : 27 September 2025

Revisi : 13 Desember 2025

Disetujui : 15 Januari 2026

Publish : 31 Januari 2026

Keyword:

*Islamic Financial Institutions,
Comparative, Malaysia, Thailand*

* Corresponding author

e-mail:

muhammadrizkaramadhani@gmail.com
alifanaufa@gmail.com

Page: 81 - 99

ABSTRACT

This study provides a comparative analysis of Islamic financial institution implementation and regulation in Malaysia, Thailand, and Indonesia to identify strengths, challenges, and development opportunities in Southeast Asia. Using a qualitative comparative approach based on library research, the study finds that Malaysia leads with strong institutional systems and comprehensive regulations, supported by the Islamic Financial Services Act (IFSA) 2013 and the Shariah Advisory Council (SAC). Thailand advances Islamic finance through an inclusive Islamic Banking Window system and the Islamic Bank of Thailand (iBank), which supports the Muslim minority's economic activities. Indonesia holds significant potential but faces regulatory fragmentation among OJK, BI, and DSN-MUI, alongside low Islamic financial literacy. The comparison highlights that institutional integration and digital innovation are crucial for future progress, suggesting Indonesia adopt Malaysia's regulatory strengths and Thailand's social inclusion model.

ILTIZAM: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam

Abstrak: Studi ini menyajikan analisis komparatif mengenai implementasi dan regulasi kelembagaan keuangan syariah di Malaysia, Thailand, dan Indonesia untuk mengidentifikasi kekuatan, tantangan, dan peluang pengembangan di kawasan Asia Tenggara. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi pustaka, temuan menunjukkan bahwa Malaysia berada di posisi terdepan berkat sistem kelembagaan yang kuat dan regulasi komprehensif seperti Islamic Financial Services Act (IFSA) 2013 serta dukungan Shariah Advisory Council (SAC). Thailand mengembangkan keuangan syariah melalui pendekatan inklusif lewat sistem Islamic Banking Window dan Islamic Bank of Thailand (iBank) yang mendukung aktivitas ekonomi muslim minoritas. Indonesia memiliki potensi besar namun menghadapi fragmentasi regulasi antara OJK, BI, dan DSN-MUI serta rendahnya literasi keuangan syariah. Hasil perbandingan menegaskan bahwa integrasi kelembagaan dan inovasi digital merupakan faktor kunci bagi kemajuan, sehingga Indonesia perlu mengadopsi kekuatan regulasi Malaysia dan model inklusi sosial Thailand.

Kata kunci: Kelembagaan Keuangan Syariah, Perbandingan, Malaysia, Thailand.

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi syariah di dunia dalam dua dekade terakhir menunjukkan pertumbuhan yang sangat pesat dan stabil. Berdasarkan laporan *Islamic Financial Services Board (IFSB) Stability Report 2025*, total aset industri keuangan syariah global mencapai USD 3,88 triliun pada akhir tahun 2024, meningkat sekitar 14,9% dibandingkan tahun 2023 ((IFSB), 2025). Pertumbuhan ini didorong oleh peningkatan investasi halal, ekspansi pasar sukuk, serta meningkatnya minat lembaga keuangan global terhadap prinsip keuangan berkelanjutan berbasis nilai-nilai etika Islam. Selain itu, *Standard Chartered Global Islamic Finance Outlook (2025)* memperkirakan bahwa nilai aset keuangan syariah dunia akan mencapai USD 7,5 triliun pada tahun

2028, menegaskan potensi luar biasa dari sektor ini dalam menopang stabilitas ekonomi global (Bank Negara Malaysia, 2025). Keuangan syariah kini tidak hanya berfungsi sebagai sistem alternatif, tetapi juga menjadi bagian integral dari sistem keuangan internasional yang mendukung pembangunan inklusif dan berkelanjutan.

Dalam konteks kawasan Asia Tenggara, Malaysia, Indonesia, dan Thailand menempati posisi penting dalam peta pertumbuhan industri keuangan syariah global. Malaysia dikenal sebagai negara yang paling sukses dalam mengembangkan sistem keuangan syariah yang terintegrasi dengan sistem nasional. Bank Negara Malaysia (BNM) melaporkan bahwa kontribusi perbankan syariah terhadap total sistem keuangan nasional mencapai 46,6 % pada kuartal II 2024, meningkat signifikan dari 43,2% pada tahun sebelumnya. Selain itu, Malaysia menguasai sekitar 34% dari pasar sukuk global, menjadikannya pusat keuangan syariah terkemuka dunia. Regulasi yang kokoh melalui *Islamic Financial Services Act (IFSA) 2013* serta keberadaan lembaga pengkajian seperti *International Shariah Research Academy (ISRA)* dan *INCEIF University* memperkuat kapasitas kelembagaan negara tersebut.

Berbeda dengan Malaysia, Thailand memulai pengembangan keuangan syariah dari skala kecil, namun menunjukkan pertumbuhan yang konsisten. Pemerintah Thailand melalui *Bank of Thailand (BOT)* dan *Islamic Bank of Thailand (IBT)* mendorong sistem *Islamic Banking Window*, yaitu layanan keuangan syariah yang disediakan oleh bank konvensional. Menurut *Annual Islamic Finance Report Thailand 2025*, aset lembaga keuangan syariah di Thailand mencapai USD 2,8 miliar dengan pertumbuhan rata-rata tahunan 7%. Keberhasilan ini didorong oleh dukungan kebijakan fiskal inklusif dan peningkatan kebutuhan masyarakat Muslim di wilayah selatan seperti Pattani dan Yala. Meskipun skala ekonominya belum sebesar Malaysia, langkah Thailand menunjukkan pendekatan progresif terhadap penguatan inklusi keuangan berbasis nilai-nilai Islam, sekaligus menegaskan bahwa sistem keuangan syariah dapat berkembang di negara dengan populasi Muslim minoritas.

Sementara itu, Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia memiliki potensi ekonomi syariah yang luar biasa besar. *Otoritas Jasa Keuangan (OJK)* mencatat total aset perbankan syariah Indonesia mencapai Rp 726 triliun (sekitar USD 56 miliar) per April 2025, dengan pertumbuhan 13% dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, kontribusi tersebut baru sekitar 7% dari total aset sistem perbankan nasional, menunjukkan bahwa potensi besar belum sepenuhnya terealisasi. Tantangan utama masih terletak pada rendahnya literasi keuangan syariah (baru mencapai 10,8% menurut *Survei Nasional Literasi Keuangan Syariah OJK 2024*), keterbatasan inovasi produk, serta kurangnya sinergi antarotoritas seperti OJK, BI, dan DSN-MUI. Meski

demikian, peluncuran *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI) 2024–2030* dan penguatan peran *Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS)* menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendorong sektor ini menuju pusat ekonomi syariah global pada 2030.

Dari perbandingan ketiga negara tersebut, tampak bahwa Malaysia unggul dari sisi kelembagaan dan inovasi, sementara Thailand unggul dari aspek inklusi sosial dan adaptasi, dan Indonesia berada pada fase konsolidasi kebijakan dan struktur kelembagaan. Malaysia berhasil mengintegrasikan seluruh sistem keuangan syariah dalam regulasi nasional, dengan *Shariah Advisory Council* sebagai otoritas tunggal fatwa ekonomi. Thailand menempuh jalur adaptif dengan menerapkan model *window system* yang fleksibel. Indonesia dapat belajar dari keduanya, dengan memperkuat tata kelola kelembagaan, memperluas inklusi keuangan berbasis pesantren, serta meningkatkan literasi publik agar partisipasi masyarakat dalam produk syariah meningkat. Selain itu, digitalisasi keuangan syariah dan pengembangan fintech halal perlu digalakkan untuk menjangkau masyarakat menengah ke bawah, khususnya sektor UMKM berbasis syariah.

Dengan demikian, artikel ini akan memfokuskan pada empat aspek utama: (1) profil geografis, demografis, dan perekonomian negara Malaysia dan Thailand; (2) dinamika kelembagaan keuangan syariah di negara Malaysia dan Thailand; (3) tantangan dan strategi kelembagaan keuangan syariah di negara Malaysia dan Thailand dalam menghadapi era global; serta (4) refleksi penerapan kelembagaan keuangan syariah di Malaysia dan Thailand bagi perkembangan ekosistem ekonomi syariah di Indonesia. Apabila refleksi tersebut diamalkan secara konsisten, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi pusat keuangan syariah global dan motor penggerak ekonomi Islam di kawasan ASEAN. Dengan pengalaman Malaysia yang matang dan pendekatan inklusif Thailand, Indonesia dapat memadukan kekuatan regulatif dan sosial untuk membangun sistem ekonomi syariah yang berkeadilan, berdaya tahan, dan berkelanjutan.

KAJIAN TEORI

Kajian teori dalam penelitian ini berlandaskan pada konsep dasar keuangan syariah yang berprinsip pada nilai-nilai Islam, terutama dalam hal keadilan, kejujuran, dan larangan riba, gharar (ketidakpastian), serta maisir (spekulasi). Sistem keuangan syariah bertujuan menciptakan stabilitas ekonomi dan kesejahteraan sosial melalui pembiayaan berbasis bagi hasil (mudharabah dan musyarakah), serta investasi yang halal dan beretika. Menurut Karim (2022), perbankan syariah berfungsi tidak hanya sebagai lembaga keuangan, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan moral ekonomi yang berorientasi pada kemaslahatan umat. Model ini berbeda dari sistem konvensional karena menempatkan aspek spiritual dan sosial sejajar dengan keuntungan finansial.

Dalam konteks kelembagaan, teori Shariah Governance menjadi kerangka penting dalam memastikan bahwa seluruh aktivitas lembaga keuangan selaras dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Malaysia menerapkan sistem ini secara komprehensif melalui *Shariah Advisory Council (SAC)* di bawah Bank Negara Malaysia, sementara Indonesia mengadopsinya melalui *Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)*. Teori tata kelola syariah menegaskan pentingnya integrasi antara regulasi, kelembagaan, dan pengawasan agar tercipta sistem keuangan yang transparan, akuntabel, serta sesuai dengan maqashid al-syariah (tujuan syariat Islam).

Dalam kerangka pembangunan ekonomi, teori keuangan inklusif syariah juga menjadi acuan utama yang menekankan pemerataan akses keuangan bagi seluruh lapisan masyarakat, baik Muslim maupun non-Muslim, sebagaimana diterapkan di Thailand melalui model *Islamic Banking Window*. Dengan demikian, kajian teori ini menempatkan keuangan syariah tidak hanya sebagai sistem ekonomi alternatif, tetapi sebagai instrumen strategis dalam mencapai pembangunan berkelanjutan, keadilan sosial, dan stabilitas ekonomi nasional maupun global.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi komparatif (comparative study). Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai perbedaan dan persamaan implementasi serta regulasi kelembagaan keuangan syariah di Malaysia, Thailand, dan Indonesia. Data penelitian diperoleh melalui studi pustaka (library research) dengan menelaah berbagai sumber sekunder, seperti laporan resmi lembaga keuangan (Bank Negara Malaysia, OJK, Islamic Bank of Thailand), publikasi ilmiah, jurnal internasional, serta laporan dari lembaga riset seperti IFSB, ISRA, dan KNEKS. Analisis data dilakukan secara deskriptif-komparatif, yaitu dengan membandingkan kebijakan, kerangka hukum, dan model kelembagaan antarnegara untuk mengidentifikasi faktor-faktor keberhasilan dan tantangan masing-masing sistem.

Langkah analisis dimulai dengan mengklasifikasi data berdasarkan aspek regulasi, kelembagaan, dan implementasi, kemudian menilai efektivitasnya terhadap perkembangan industri keuangan syariah nasional. Validitas data diperkuat dengan triangulasi sumber dari laporan resmi dan literatur akademik terkini. Melalui metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai posisi dan arah pengembangan keuangan syariah di Indonesia dengan mengambil pembelajaran dari model Malaysia yang kuat secara regulatif dan Thailand yang adaptif secara sosial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Geografis dan Perekonomian di Negara Malaysia dan Thailand

Kondisi geografis dan perekonomian Malaysia dan Thailand menjadi dasar penting untuk memahami perkembangan kelembagaan ekonomi Islam di kedua negara. Keduanya berada di kawasan Asia Tenggara dan tergabung dalam ASEAN, tetapi memiliki karakter wilayah dan struktur ekonomi yang berbeda. Perbedaan inilah yang kemudian memengaruhi arah kebijakan pembangunan serta bentuk lembaga-lembaga ekonomi yang berkembang (Wardoyo, 2019).

Malaysia terbagi atas dua wilayah utama, yaitu Semenanjung Malaysia dan wilayah Malaysia Timur yang terdiri atas Sabah dan Sarawak di Pulau Kalimantan. Kedua wilayah tersebut dipisahkan oleh Laut Cina Selatan. Semenanjung Malaysia menghadap langsung ke Selat Malaka, salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia yang menghubungkan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik (International Monetary Fund [IMF], 2018). Posisi strategis ini mendorong munculnya pusat-pusat perdagangan, kawasan industri, dan layanan keuangan di kota-kota seperti Kuala Lumpur, Penang, dan Johor Bahru (Haque & Puspitasari, 2022).

Dalam perekonomian global, Malaysia digolongkan sebagai negara berpendapatan menengah atas dengan struktur ekonomi yang cukup beragam. Sektor jasa memberikan kontribusi terbesar terhadap Produk Domestik Bruto, diikuti oleh sektor industri manufaktur seperti elektronik, otomotif, dan petrokimia. Sektor pertanian menyumbang porsi yang lebih kecil, tetapi tetap penting melalui komoditas karet dan kelapa sawit (Haque & Puspitasari, 2022). Secara umum, perekonomian Malaysia relatif stabil dengan inflasi yang terkendali dan pengelolaan kebijakan fiskal dan moneter yang dinilai cukup kredibel (IMF, 2018). Laporan terbaru menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Malaysia setelah pandemi kembali menguat dengan laju yang berada di kisaran lima persen per tahun, ditopang oleh konsumsi rumah tangga, investasi, dan ekspor (World Bank, 2024).

Thailand memiliki karakter geografis yang berbeda dengan Malaysia. Negara ini terletak di daratan utama Asia Tenggara, tepatnya di Semenanjung Indochina. Thailand berbatasan darat dengan Myanmar, Laos, Kamboja, dan Malaysia serta memiliki garis pantai yang membentang di Teluk Thailand dan Laut Andaman (Christian, 2021). Kedudukan ini menjadikan Thailand sebagai penghubung jalur darat dan laut di kawasan, sekaligus penting bagi jaringan logistik dan perdagangan regional.

Struktur perekonomian Thailand ditopang oleh tiga sektor utama, yaitu pertanian, industri manufaktur, dan pariwisata. Pertanian, terutama padi, tapioka, tebu, karet, dan komoditas pangan

lain, masih menyerap banyak tenaga kerja dan menjadi penopang ekspor pangan (Christian, 2021). Di saat yang sama, Thailand dikenal sebagai salah satu basis produksi otomotif dan elektronik di Asia Tenggara sehingga memiliki peran penting dalam rantai pasok industri regional (World Bank, 2024). Sektor pariwisata juga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian. Sebelum pandemi, pariwisata diperkirakan menyumbang sekitar seperlima Produk Domestik Bruto dan menjadi sumber devisa utama (Molasy & Oktavia, 2023). Upaya pemulihan pariwisata setelah pandemi dilakukan melalui perbaikan aksesibilitas, peningkatan layanan, dan pemanfaatan teknologi digital (Simanjuntak, et, Molasy, 2025).

Pertumbuhan ekonomi Thailand dalam beberapa tahun terakhir cenderung moderat. Laporan Bank Dunia menunjukkan bahwa laju pertumbuhan Produk Domestik Bruto berada di kisaran dua hingga tiga persen per tahun. Pemulihan setelah pandemi berlangsung lebih lambat karena ketergantungan yang cukup tinggi pada pariwisata serta tekanan eksternal terhadap ekspor (World Bank, 2024). Walaupun demikian, Thailand tetap dikategorikan sebagai salah satu ekonomi besar di kawasan dengan basis industri dan pertanian yang cukup kuat.

Secara singkat, Malaysia lebih bercorak maritim dengan wilayah yang terbagi dua dan posisi strategis di Selat Malaka, sedangkan Thailand lebih bercorak daratan dengan tambahan garis pantai yang mendukung perdagangan dan pariwisata (IMF, 2018; Christian, 2021). Perbedaan konfigurasi wilayah ini berpengaruh pada orientasi ekonomi. Malaysia berkembang sebagai pusat industri manufaktur dan jasa keuangan, sementara Thailand mengandalkan kombinasi pertanian, industri, dan pariwisata (Haque & Puspitasari, 2022; Molasy & Oktavia, 2023). Gambaran umum mengenai kondisi geografis dan perekonomian ini menjadi landasan untuk membaca bagaimana kelembagaan ekonomi Islam mendapatkan ruang dan bentuk yang berbeda di kedua negara.

Dinamika Kelembagaan Islam di Negara Malaysia dan Thailand

Sejak pendirian Islamic Bank of Thailand (iBank) yang bermula secara operasional pada 2003 setelah pengesahan Islamic Bank of Thailand Act 2002, Thailand mulai menunjukkan komitmen terhadap pengembangan lembaga keuangan syariah secara resmi. Menurut studi terbaru, iBank kini berada di bawah pengawasan penuh Ministry of Finance (Thailand) dengan kepemilikan negara hampir 100 % melalui restrukturisasi saham selama akhir 2010-an (al, 2024). Bank ini memiliki sekitar 94 cabang di seluruh negeri dan melayani nasabah Muslim maupun non-Muslim (sekitar 58 % Muslim dan 42 % non-Muslim) yang menunjukkan bahwa orientasi lembaga ini tidak semata sektor minoritas tapi juga inklusi yang lebih luas. Dalam konteks ini, meskipun populasi Muslim di Thailand hanya sekitar 5,4 %, pengembangan keuangan syariah dilihat sebagai instrumen

inklusi keuangan dan diversifikasi sistem keuangan domestik (St. Theresa Journal of Humanities and Social Sciences, 2025).

Malaysia dan Thailand menunjukkan dua pola yang berbeda walaupun keduanya berada dalam kawasan yang sama. Malaysia menjadikan ekonomi Islam sebagai bagian dari strategi pembangunan nasional, sedangkan Thailand mengembangkannya terutama untuk memenuhi kebutuhan komunitas Muslim yang berposisi sebagai minoritas (Ghozali, A,n, 2019).

Di Malaysia, cikal bakal kelembagaan ekonomi Islam dapat dilihat dari pendirian Lembaga Tabung Haji pada awal 1960-an. Lembaga ini dirancang untuk mengelola tabungan biaya haji masyarakat dengan cara yang dianggap selaras dengan prinsip syariah dan sekaligus mengelola dana tersebut secara produktif dalam kegiatan usaha yang halal (Ghozali et al., 2019). Pengalaman pengelolaan Tabung Haji kemudian menjadi landasan ketika pemerintah mulai merancang sistem perbankan Islam formal.

Langkah penting berikutnya adalah lahirnya Islamic Banking Act tahun 1983 yang membuka jalan bagi pendirian Bank Islam Malaysia Berhad sebagai bank syariah pertama di negara tersebut (Ghozali et al., 2019). Melalui undang-undang ini, pemerintah memberi dasar hukum yang jelas bagi operasional perbankan syariah dan menetapkan peran Bank Negara Malaysia sebagai otoritas yang mengatur serta mengawasi kegiatan bank Islam. Sejak saat itu, Malaysia resmi menerapkan sistem keuangan ganda, yaitu perbankan konvensional dan perbankan syariah yang berjalan berdampingan dalam satu sistem nasional (Malaysia International Islamic Financial Centre, 2012).

Perkembangan selanjutnya ditandai dengan diberikannya izin bagi bank-bank konvensional untuk membuka unit usaha syariah. Langkah ini memperluas akses masyarakat terhadap produk keuangan syariah tanpa harus selalu berhubungan dengan bank syariah penuh (Malaysia International Islamic Financial Centre, 2012). Dalam tahap berikutnya, kerangka regulasi terus disempurnakan sehingga perbankan syariah, perusahaan takaful, dan lembaga keuangan syariah lain memiliki aturan yang lebih terarah dan konsisten.

Ekosistem ekonomi Islam di Malaysia tidak hanya mencakup perbankan. Industri takaful berkembang dengan hadirnya perusahaan asuransi syariah yang melayani kebutuhan perlindungan risiko bagi individu dan perusahaan (Malaysia International Islamic Financial Centre, 2012). Di pasar modal, otoritas sekuritas menerbitkan daftar efek syariah dan mendorong penerbitan sukuk sehingga Malaysia dikenal sebagai salah satu pusat pasar modal Islam. Selain itu, pemerintah dan lembaga pendidikan mendirikan pusat-pusat studi seperti International Centre for Education in

Islamic Finance yang berfokus pada pengembangan sumber daya manusia dan riset keuangan Islam (Bank Negara Malaysia, 2016).

Kelembagaan ekonomi Islam di Malaysia juga tampak kuat pada sisi sosial. Lembaga zakat resmi di setiap negeri bagian mengelola penghimpunan dan penyaluran zakat dengan struktur organisasi dan tata kelola syariah yang terus diperbaiki (Kamaruddin, Shafii, Hanefah, Salleh, & Zakaria, 2024). Sementara itu, pengelolaan wakaf berkembang melalui lembaga wakaf negeri dan kerja sama dengan perguruan tinggi, sehingga aset wakaf dimanfaatkan tidak hanya untuk pembangunan masjid, tetapi juga untuk pendidikan, kesehatan, dan program pemberdayaan ekonomi (Ramadhan, 2025). Jejaring perbankan, takaful, pasar modal, zakat, wakaf, dan lembaga pendidikan menjadikan ekosistem ekonomi Islam di Malaysia relatif lengkap dan saling mendukung (Malaysia International Islamic Financial Centre, 2012).

Di Thailand, pola perkembangan kelembagaan ekonomi Islam berbeda karena Muslim berada dalam posisi minoritas. Komunitas Muslim banyak terkonsentrasi di wilayah selatan seperti Pattani, Yala, dan Narathiwat yang berbatasan dengan Malaysia (Haron, Yamirudeng, 2003). Kebutuhan masyarakat Muslim terhadap layanan keuangan yang sesuai syariah mendorong munculnya berbagai inisiatif, baik dari lembaga pemerintah maupun dari komunitas lokal.

Perintisan perbankan Islam di Thailand dimulai ketika beberapa bank milik negara memperkenalkan produk tanpa bunga melalui unit layanan khusus. Pengalaman ini kemudian menjadi dasar bagi pendirian Islamic Bank of Thailand sebagai bank syariah milik negara yang bertugas memberikan layanan pembiayaan dan simpanan berbasis prinsip syariah (Haron, Yamirudeng, 2003). Bank ini berperan penting sebagai simbol perhatian negara kepada kebutuhan ekonomi umat Islam dan sebagai lembaga yang menyediakan akses keuangan bagi masyarakat di wilayah selatan.

Penelitian yang lebih baru menunjukkan bahwa Islamic Bank of Thailand masih menghadapi tantangan, antara lain skala usaha yang terbatas, kualitas aset, dan kebutuhan penguatan tata kelola manajemen (Hama, 2024). Meski demikian, bank ini tetap menjadi aktor utama dalam peta kelembagaan ekonomi Islam di Thailand. Di luar bank, terdapat pula unit-unit layanan syariah pada beberapa lembaga keuangan lain yang menawarkan produk pembiayaan kepada nasabah Muslim (Hama, 2024).

Pada tingkat komunitas, kehadiran koperasi keuangan syariah menjadi bagian penting dari dinamika kelembagaan ekonomi Islam di Thailand. Koperasi-koperasi ini umumnya berdiri di sekitar masjid, sekolah Islam, atau pesantren lokal dan berfungsi menyediakan tabungan serta

pembiayaan kecil bagi anggotanya (Islamic Financial Cooperative in Thailand, 2024). Studi terbaru menyebut bahwa koperasi keuangan syariah berpotensi menjadi sarana pemberdayaan ekonomi umat, namun masih memerlukan peningkatan kapasitas pengelola dan dukungan regulasi yang memadai (Islamic Financial Cooperative in Thailand, 2024).

Dari sisi kebijakan, keuangan syariah di Thailand belum diatur dalam kerangka hukum yang selengkap Malaysia. Islamic Bank of Thailand memiliki dasar hukum khusus, tetapi banyak lembaga lain seperti koperasi dan unit syariah di bank konvensional masih berada dalam aturan umum yang disusun untuk sistem keuangan konvensional (Worasutr, 2022). Karena itu, sejumlah penelitian menekankan pentingnya pembaruan regulasi untuk memperjelas kedudukan lembaga keuangan syariah dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi nasabah (Hama, 2024).

Secara keseluruhan, perbandingan kedua negara menunjukkan bahwa Malaysia mengembangkan kelembagaan ekonomi Islam melalui desain kebijakan yang terencana dan dukungan regulasi yang jelas, sementara Thailand bergerak secara bertahap dengan basis komunitas yang lebih kuat tetapi dengan ekosistem yang masih terbatas (Ghozali et al., 2019). Di Malaysia, ekonomi Islam menjadi bagian dari strategi menjadikan negara tersebut pusat keuangan Islam, sedangkan di Thailand ekonomi Islam lebih berfungsi sebagai layanan yang menjawab kebutuhan kelompok minoritas. Perbedaan ini penting sebagai dasar analisis ketika mengulas tantangan, strategi penguatan, dan pelajaran yang dapat diambil bagi Indonesia.

Tantangan dan Strategi Penguatan Kelembagaan Ekonomi Islam Global di Negara Malaysia dan Thailand

Perkembangan kelembagaan ekonomi Islam di Malaysia dan Thailand tidak terlepas dari perubahan lingkungan global. Integrasi pasar keuangan, munculnya teknologi digital, tuntutan tata kelola yang transparan, dan persaingan dengan lembaga keuangan konvensional membuat lembaga keuangan syariah di kedua negara menghadapi tekanan yang terus meningkat (Hasan, 2020). Tantangannya bukan hanya bagaimana bertahan, tetapi bagaimana memanfaatkan peluang global agar kelembagaan ekonomi Islam tetap relevan dan berdaya saing.

Di Malaysia, tantangan utama berkaitan dengan konsistensi regulasi, inovasi produk, dan penguatan tata kelola syariah. Malaysia telah lama menempatkan diri sebagai salah satu pusat keuangan Islam dunia sehingga harus mampu menjaga kepercayaan investor internasional dan pelaku industri (Pongsaparn, 2024). Posisi sebagai pusat keuangan Islam menuntut standar regulasi yang tinggi, harmonisasi fatwa, dan kepastian hukum bagi semua pelaku pasar. Laporan mengenai pengembangan keuangan Islam di Malaysia menegaskan bahwa keberhasilan masa lalu tidak

otomatis menjamin keberhasilan masa depan jika negara tidak terus memperbarui kerangka kebijakan dan kelembagaannya (Mainstreaming Islamic Finance within Global Financial Systems, 2015).

Tantangan berikutnya berasal dari perkembangan teknologi keuangan. Pemanfaatan teknologi finansial dapat memperluas jangkauan layanan perbankan syariah, tetapi juga memunculkan risiko baru seperti keamanan data, perlindungan konsumen, dan kepatuhan syariah di dalam platform digital (Hasan, 2020). Kajian lain menunjukkan bahwa kerangka hukum dan pengawasan teknologi keuangan syariah di berbagai negara, termasuk Malaysia, masih perlu diperkuat agar inovasi tidak mengorbankan aspek kepatuhan dan stabilitas sistem keuangan (Fidhayanti, 2025).

Dalam konteks yang lebih spesifik, penelitian mengenai penerapan kecerdasan buatan dalam perbankan syariah di Malaysia menemukan adanya kekosongan pengaturan yang jelas tentang etika, transparansi, dan akuntabilitas penggunaan teknologi tersebut (Rahim, 2025). Sumber daya manusia juga menjadi isu penting. Malaysia membutuhkan tenaga profesional yang tidak hanya menguasai fiqh muamalah, tetapi juga memahami instrumen keuangan modern, manajemen risiko, dan teknologi digital (Pongsaparn, 2024). Tanpa kualitas sumber daya manusia yang memadai, inovasi produk dan penguatan tata kelola akan berjalan lambat.

Menghadapi tantangan tersebut, Malaysia memilih strategi penguatan kelembagaan melalui beberapa langkah. Pemerintah menyusun berbagai peta jalan dan cetak biru sektor keuangan yang secara eksplisit menjadikan keuangan Islam sebagai salah satu pilar utama, baik melalui inisiatif Malaysia International Islamic Financial Centre maupun melalui rencana strategis yang menegaskan visi sebagai pusat keuangan Islam global (Malaysia's Vision towards Becoming the Islamic Finance Global Hub, 2018). Langkah ini dilengkapi dengan pembentukan forum kepemimpinan seperti MIFC Leadership Council yang merumuskan prinsip, fokus strategis, dan proyek prioritas untuk babak baru kepemimpinan Malaysia dalam keuangan Islam (MIFC Leadership Council, 2025). Strategi ini menunjukkan bahwa penguatan kelembagaan tidak hanya dilihat sebagai urusan perbankan, tetapi sebagai bagian dari agenda pembangunan nasional jangka panjang.

Strategi lain adalah menjadikan keuangan Islam sebagai mitra bagi sektor riil dan industri halal. Laporan perkembangan keuangan Islam global menempatkan Malaysia sebagai salah satu pasar terbesar berdasarkan aset dan menekankan kontribusi keuangan Islam terhadap pembiayaan proyek infrastruktur, pengembangan pasar modal, dan dukungan terhadap sektor halal (Islamic

Finance Development Report, 2024). Integrasi ini membuat kelembagaan ekonomi Islam tidak hanya hadir di sektor keuangan, tetapi juga menyentuh perdagangan, pariwisata, dan industri makanan serta farmasi.

Di Thailand, tantangan kelembagaan ekonomi Islam berbeda karena basisnya adalah komunitas Muslim minoritas dan skala industrinya masih relatif kecil. Kajian tentang pertumbuhan keuangan Islam di Thailand menunjukkan bahwa tantangan utama mencakup keterbatasan ukuran pasar, kapasitas kelembagaan, dan ketergantungan pada dukungan pemerintah (Hama, 2023). Islamic Bank of Thailand sebagai aktor utama perbankan syariah pernah menghadapi masalah kredit bermasalah yang tinggi sehingga harus menjalani proses restrukturisasi dan pengelolaan aset bermasalah melalui pembentukan perusahaan khusus (Recent Developments in the Islamic Financial Industry in Thailand, 2023). Kondisi ini menunjukkan bahwa penguatan tata kelola, manajemen risiko, dan kualitas aset merupakan agenda mendesak bagi kelembagaan ekonomi Islam di Thailand.

Tantangan lain yang sering disebut adalah tingkat literasi keuangan syariah yang masih rendah, baik di kalangan masyarakat umum maupun sebagian pegawai lembaga keuangan sendiri. Penelitian mengenai dampak perbankan Islam di tiga provinsi selatan Thailand menemukan bahwa minimnya pemahaman mengenai produk dan konsep keuangan syariah menjadi hambatan utama pemanfaatan layanan keuangan Islam (Bakhri, 2023). Situasi ini diperkuat oleh temuan lain yang menunjukkan bahwa sebagian pelaku usaha Muslim masih kesulitan memahami laporan keuangan berbasis syariah karena belum adanya pedoman yang jelas dan merata di tingkat akar rumput (The Need g, 2025).

Kerangka regulasi juga menjadi persoalan penting. Pemerintah Thailand memang telah memberikan landasan hukum bagi Islamic Bank of Thailand, namun pengaturan menyeluruh mengenai lembaga keuangan syariah lain seperti koperasi dan unit syariah di bank konvensional masih belum sekuat yang diharapkan (Hama, 2023). Beberapa kajian menekankan bahwa ketidakjelasan kerangka regulasi menghambat inovasi produk, mengurangi kepercayaan investor, dan menyulitkan perluasan akses keuangan syariah di luar wilayah selatan (Salam, 2025).

Menghadapi berbagai tantangan tersebut, strategi penguatan kelembagaan ekonomi Islam di Thailand berkembang secara bertahap. Pemerintah dan otoritas keuangan berupaya memperbaiki kinerja Islamic Bank of Thailand melalui program restrukturisasi, pengelolaan aset bermasalah, serta peningkatan fokus pada pembiayaan sektor usaha kecil dan menengah (Hama,

2023). Upaya ini bertujuan menjadikan bank Islam nasional lebih sehat dan mampu menjalankan fungsi pembiayaan pembangunan di wilayah mayoritas Muslim.

Di sisi lain, koperasi keuangan syariah dipandang sebagai salah satu potensi strategis untuk memperluas jangkauan keuangan Islam di Thailand. Kajian terbaru mengenai koperasi keuangan syariah menegaskan bahwa lembaga ini memiliki peluang besar untuk tumbuh jika mendapat dukungan pelatihan manajemen, penguatan tata kelola, dan akses ke sumber pendanaan yang lebih luas (Islamic Financial Cooperative in Thailand, 2024). Penguatan kapasitas kelembagaan di tingkat komunitas dianggap penting karena langsung menyentuh kebutuhan ekonomi masyarakat Muslim sehari-hari.

Strategi lain yang mulai ditempuh adalah pengembangan kerangka kebijakan yang lebih ramah terhadap industri halal dan produk keuangan syariah. Penelitian mengenai Muslim Thailand dan lembaga keuangan Islam menunjukkan bahwa peningkatan pemahaman terhadap kebutuhan keuangan komunitas Muslim serta penyesuaian kebijakan di sektor pariwisata, perdagangan, dan jasa dapat memperluas ruang bagi keuangan syariah di Thailand (Asengbaramae, 2023). Upaya ini berjalan seiring dengan program pemerintah untuk meningkatkan daya tarik investasi dan menjadikan wilayah selatan sebagai pintu masuk kerja sama ekonomi dengan negara tetangga yang mayoritas Muslim.

Perbandingan antara Malaysia dan Thailand memperlihatkan bahwa tantangan global yang dihadapi kelembagaan ekonomi Islam secara garis besar serupa, yaitu kebutuhan akan regulasi yang kuat, tata kelola yang baik, inovasi teknologi, dan peningkatan literasi. Perbedaannya terletak pada skala dan kedalaman respons kebijakan. Malaysia merespons tantangan global dengan strategi yang terencana, menyusun cetak biru, dan mengaitkan penguatan kelembagaan dengan visi sebagai pusat keuangan Islam dunia (Malaysia's Vision towards Becoming the Islamic Finance Global Hub, 2018). Thailand, di sisi lain, bergerak secara bertahap dengan menekankan penguatan lembaga yang sudah ada seperti Islamic Bank of Thailand dan koperasi keuangan syariah, sambil perlahan memperbaiki kerangka regulasi dan literasi masyarakat (Hama, 2023).

Gambaran ini menunjukkan bahwa penguatan kelembagaan ekonomi Islam dalam menghadapi tantangan global tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial politik dan kapasitas institusional masing-masing negara. Malaysia menonjol dengan pendekatan dari atas ke bawah yang diarahkan oleh negara, sedangkan Thailand menonjolkan pendekatan dari bawah ke atas yang bertumpu pada komunitas. Keduanya memberikan pelajaran berbeda tentang bagaimana lembaga

ekonomi Islam dapat beradaptasi dengan tekanan global tanpa kehilangan karakter nilai yang menjadi landasan utamanya.

Reflektif Perbandingan Kelembagaan Ekonomi Islam di Negara Malaysia dan Thailand bagi Indonesia

Malaysia menerapkan model *dual banking system*, di mana saaasaas perbankan konvensional dan syariah beroperasi berdampingan dalam satu sistem yang saling melengkapi. Model ini memberikan fleksibilitas bagi nasabah untuk memilih layanan sesuai kebutuhan, sekaligus memperluas pangsa pasar industri syariah. Pendekatan tersebut mempercepat perkembangan lembaga keuangan syariah di berbagai sektor, mulai dari perbankan, takaful (asuransi syariah), hingga sukuk (obligasi syariah). Bahkan, Malaysia menjadi negara pertama di dunia yang menerbitkan sukuk internasional berdaulat pada tahun 2002, yang kemudian diikuti oleh banyak negara lain termasuk Indonesia.

Pengalaman Malaysia dan Thailand dalam membangun kelembagaan ekonomi Islam memberi cermin penting bagi Indonesia, terutama karena ketiga negara sama-sama berada di kawasan ASEAN dan menghadapi tekanan global yang mirip, tetapi dengan kapasitas kelembagaan yang berbeda. Kajian perbandingan kebijakan ekonomi syariah di beberapa negara menunjukkan bahwa Malaysia dan Indonesia berada di barisan depan pengembangan ekonomi syariah di ASEAN, sementara Thailand masih berada pada tahap konsolidasi awal dengan skala yang lebih kecil (Fadhil, 2024).

Dari Malaysia, pelajaran utama bagi Indonesia adalah konsistensi desain kebijakan dan keberanian menjadikan keuangan syariah sebagai bagian dari strategi pembangunan nasional jangka panjang. Malaysia sejak awal memberikan landasan hukum yang jelas bagi perbankan syariah, membentuk dewan syariah di tingkat otoritas keuangan, dan membangun ekosistem yang mencakup perbankan, pasar modal, takaful, zakat, wakaf, serta lembaga pendidikan yang saling terhubung (Sirajuddin, 2018). Pendekatan ini membuat kelembagaan ekonomi Islam tidak berdiri sendiri, tetapi menyatu dalam arsitektur sistem keuangan dan kebijakan pembangunan nasional yang lebih luas.

Posisi Malaysia sebagai salah satu kekuatan utama keuangan Islam di kawasan juga menunjukkan bahwa dukungan regulasi, kepastian hukum, dan kepemimpinan kelembagaan dapat mendorong negara dengan jumlah penduduk lebih kecil menjadi rujukan global dalam industri keuangan syariah (Li, 2024). Bagi Indonesia, hal ini mengingatkan bahwa jumlah penduduk Muslim

yang besar tidak otomatis menjamin keunggulan jika tidak diikuti oleh tata kelola kelembagaan yang kuat dan terintegrasi.

Di sisi lain, pengalaman Thailand relevan bagi Indonesia dalam hal penguatan kelembagaan di wilayah wilayah yang Muslimnya minoritas dan pada level komunitas. Thailand membangun kelembagaan ekonomi Islam yang berangkat dari kebutuhan komunitas Muslim di provinsi selatan melalui bank syariah nasional, unit layanan syariah, dan terutama koperasi keuangan syariah yang beroperasi dekat dengan masyarakat (Islamic Financial Cooperative in Thailand, 2024). Model ini menunjukkan bahwa lembaga keuangan syariah skala kecil dapat memainkan peran penting bagi pemberdayaan ekonomi, sekalipun berada dalam lingkungan negara yang tidak mayoritas Muslim.

Penelitian tentang efisiensi dan produktivitas bank syariah di ASEAN menggambarkan bahwa Indonesia dan Malaysia memiliki jumlah bank syariah yang jauh lebih banyak dibanding Thailand, namun Thailand tetap masuk dalam jaringan perbankan syariah kawasan dan dapat dimanfaatkan sebagai mitra integrasi keuangan regional (Riani, 2024). Fakta bahwa Thailand dapat mengembangkan lembaga keuangan syariah di tengah dominasi sistem keuangan konvensional memperlihatkan bahwa ruang pengembangan ekonomi Islam selalu terbuka selama ada dukungan kebijakan minimum dan inisiatif komunitas yang kuat.

Bagi Indonesia, refleksi penting berikutnya berkaitan dengan posisi dan capaian terkini. Berbagai laporan internasional menunjukkan bahwa Indonesia berada pada peringkat tinggi dalam indeks keuangan dan ekonomi Islam global, namun kontribusi aset keuangan syariah Indonesia terhadap aset syariah dunia masih relatif kecil dibanding potensi yang dimiliki (Wardana, Abdani, 2022). Laporan lain mencatat bahwa Indonesia menduduki peringkat empat dunia dalam Global Islamic Finance Index, tetapi hanya menyumbang kurang dari dua persen terhadap total aset keuangan syariah global (Rofiudin, 2025). Data ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pengakuan normatif dan skala nyata kelembagaan ekonomi Islam di Indonesia.

Pemerintah Indonesia sebenarnya telah merespons tantangan tersebut melalui penyusunan Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019–2024 yang menempatkan penguatan kelembagaan keuangan syariah, pengembangan industri halal, dan penguatan usaha syariah sebagai pilar utama (Komite Nasional Keuangan Syariah, 2019). Pembentukan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah dan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah di berbagai provinsi juga menunjukkan adanya upaya untuk menata koordinasi kelembagaan dari tingkat nasional hingga daerah (KNEKS, 2024). Kebijakan ini sejalan dengan pernyataan otoritas moneter bahwa Indonesia menargetkan diri sebagai pusat ekonomi syariah dunia dalam beberapa tahun mendatang

dengan mengandalkan penguatan rantai nilai halal, pembiayaan syariah yang inklusif, serta peningkatan literasi (Bank Indonesia, 2025).

Jika dibandingkan dengan Malaysia, refleksi kritis bagi Indonesia adalah perlunya konsistensi implementasi masterplan, terutama dalam mengurangi fragmentasi kebijakan dan tumpang tindih kewenangan antar lembaga. Kajian tentang peran KNEKS menegaskan bahwa keberadaan komite nasional tidak otomatis efektif bila tidak disertai penguatan koordinasi, kapasitas lembaga, dan tindak lanjut kebijakan yang terukur di sektor keuangan maupun sektor riil (Robani, Ysri, 2024). Di sinilah pengalaman Malaysia yang menata regulasi sejak awal dan menjaga konsistensi kebijakan menjadi rujukan penting.

Di saat yang sama, Indonesia dapat mengambil pelajaran dari Thailand mengenai pentingnya memperkuat lembaga akar rumput seperti Baitul Maal wat Tamwil, koperasi syariah, dan lembaga keuangan mikro yang dekat dengan masyarakat kecil. Penelitian perbandingan bank syariah di ASEAN menunjukkan bahwa perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia cenderung terkonsentrasi pada segmen tertentu, sehingga penguatan lembaga keuangan mikro berbasis komunitas sangat penting untuk memperluas inklusi keuangan syariah (Sharia Banking Efficiency Analysis, 2021). Dalam hal ini, pola koperasi keuangan syariah di Thailand dapat menjadi inspirasi untuk memperkuat jaringan kelembagaan keuangan syariah di daerah-daerah yang jauh dari pusat ekonomi.

Refleksi lain menyangkut dimensi daya saing global. Studi tentang kinerja perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia menunjukkan bahwa dari sisi efisiensi dan skala aset, Malaysia masih lebih unggul, sementara Indonesia memiliki potensi pertumbuhan yang besar dan keunggulan pada sasaran pendidikan dan pemberdayaan sosial (Fadila, 2021). Hal ini memberikan isyarat bahwa Indonesia perlu menata arah penguatan kelembagaan ekonomi Islam bukan hanya untuk mengejar besaran aset, tetapi juga untuk memperkuat peran sosial, inklusi, dan transformasi perilaku ekonomi umat.

Secara keseluruhan, pengalaman Malaysia mengingatkan Indonesia tentang pentingnya kebijakan yang konsisten, kepastian regulasi, dan integrasi kelembagaan dari pusat hingga daerah, sementara pengalaman Thailand mengajarkan nilai penguatan komunitas, peran lembaga mikro, dan pentingnya literasi di lapisan akar rumput. Kombinasi kedua pelajaran ini menunjukkan bahwa penguatan kelembagaan ekonomi Islam di Indonesia sebaiknya bergerak dalam dua arah sekaligus, yaitu dari atas melalui kebijakan nasional yang terencana dan dari bawah melalui penguatan lembaga keuangan dan sosial berbasis komunitas. Dari cara pandang reflektif seperti ini, pengembangan

kelembagaan ekonomi Islam di Indonesia tidak lagi sekadar meniru model negara lain, tetapi menjadikan pengalaman Malaysia dan Thailand sebagai bahan pembanding untuk merancang strategi yang sesuai dengan karakter demografis, politik, dan sosial Indonesia sendiri.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan dari penelitian adalah:

1. Kondisi geografis dan struktur perekonomian Malaysia dan Thailand membentuk landasan berbeda bagi tumbuhnya kelembagaan ekonomi Islam. Malaysia berada pada jalur strategis Selat Malaka, ekonomi lebih terdiversifikasi ke sektor jasa, industri, serta keuangan modern. Thailand berlokasi di daratan utama Asia Tenggara, ekonomi bertumpu pada pertanian, industri, serta pariwisata, sehingga ruang bagi ekonomi Islam muncul terutama di kantong kantong Muslim wilayah selatan.
2. Dinamika kelembagaan ekonomi Islam di Malaysia tampak lebih sistematis dan menyeluruh. Ekosistem mencakup perbankan syariah, takaful, pasar modal syariah, zakat, wakaf, serta lembaga pendidikan yang terikat regulasi cukup jelas. Thailand memperlihatkan pola lebih bertahap, lembaga utama berupa Islamic Bank of Thailand, unit layanan syariah, serta koperasi keuangan syariah skala komunitas, kapasitas kelembagaan masih terbatas dan banyak bergantung pada prakarsa lokal.
3. Tantangan utama bagi kedua negara meliputi penguatan regulasi, peningkatan kualitas tata kelola, pemanfaatan teknologi keuangan, serta peningkatan literasi masyarakat. Malaysia menjawab tantangan melalui cetak biru nasional, integrasi keuangan syariah pada industri halal, serta investasi sumber daya manusia. Thailand berfokus pada perbaikan kinerja bank syariah nasional, penguatan koperasi keuangan syariah, serta penyusunan kebijakan yang lebih ramah terhadap kebutuhan Muslim minoritas.
4. Bagi Indonesia, pengalaman Malaysia menegaskan arti penting konsistensi kebijakan, kepastian regulasi, serta koordinasi kelembagaan ekonomi Islam dari tingkat pusat sampai daerah. Pengalaman Thailand menonjolkan peran strategis lembaga akar rumput seperti BMT, koperasi, serta lembaga keuangan mikro syariah bagi perluasan inklusi dan pemberdayaan umat. Apabila Indonesia mampu memadukan ketegasan arah kebijakan ala Malaysia serta kekuatan basis komunitas sebagaimana terlihat pada kasus Thailand,

penguatan kelembagaan ekonomi Islam berpeluang lebih seimbang, realistik, serta sesuai karakter masyarakat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Asengbaramae, R. (2023). The Thai Muslim and Islamic financial institutions: A socio economic overview. *Transaction: Journal of Islamic Economics, Finance and Banking*, 1(1), 45–60.
- ASAS Portal. (2023). Malaysia Islamic Banking System Edges Towards Banking System Parity.
- Bakhri, B. S. (2023). The impact of Islamic banking on economic growth in Thailand's southern provinces. *Al Uqud: Journal of Islamic Economics*, 7(1), 89–104.
- Bank Negara Malaysia. (2024). Financial Sector Blueprint 2022–2026 Report. Kuala Lumpur: BNM.
- Bank Negara Malaysia. (2024). Malaysia Islamic Finance Development Report 2024. Kuala Lumpur: BNM Publications.
- Business Today Malaysia. (2024, 21 Maret). Malaysian Islamic Banks Remain Primary Engine of Financing Growth.
- Business Today Malaysia. (2025, 24 Maret). Islamic Banking Hits New High At 46.6%.
- Business Today Editor. (2025, 14 Agustus). ASEAN Among Largest Islamic Finance Industry, Fitch Expects Cross US\$1 Trillion By End 2026.
- Christian, N. (2021). Perkembangan akuntansi Thailand dan analisis shenanigans pada perusahaan Group Lease. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 5(2), 321–335.
- Fidhayanti, D. (2025). Regulatory frameworks in Islamic fintech: A comparative analysis of Indonesia and Malaysia. *Jurnal Legal Reasoning*, 7(1), 15–32.
- Ghozali, M., Azmi, M. U., & Nugroho, W. (2019). Perkembangan bank syariah di Asia Tenggara. *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(1), 45–52.
- Hama, Z. (2023). The growth and challenges of Islamic finance in Thailand. *International Journal of Islamic Thought*, 25, 177–193.
- Haque, N., & Puspitasari, D. (2022). Analisis sumber pendapatan negara dan alokasi belanjanya dalam keuangan publik Islam era kekinian di Malaysia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 9(2), 357–370.
- Haron, S., & Yamirudeng, K. (2003). Islamic banking in Thailand: Prospects and challenges. *International Journal of Islamic Financial Services*, 5(2), 1–18.
- Hasan, R. (2020). Fintech and Islamic finance: Literature review and research agenda. *International Journal of Islamic Economics and Finance (IJIEF)*, 3(1), 75–100.

International Monetary Fund. (2018). Malaysia's economy: Getting closer to high-income status. IMF.

Islamic Finance Development Report. (2024). Islamic Finance Development Report 2024. ICD – Refinitiv.

Islamic Financial Cooperative in Thailand. (2024). Islamic financial cooperative in Thailand: Challenges and opportunities. International Journal of Economics and Finance Studies, 16(2), 1–15.

Kamaruddin, M. I. H., Shafii, Z., Hanefah, M. M., Salleh, S., & Zakaria, N. (2024). Exploring Shariah audit practices in zakat and waqf institutions in Malaysia. Journal of Islamic Accounting and Business Research, 15(3), 402–421.

Karim. A. A. (2022). *Prinsip dan Operasi Perbankan Syariah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS). (2025).

Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2025–2029 (MEKSI II). Jakarta: KNEKS.

Mainstreaming Islamic Finance within Global Financial Systems. (2015). Country report: Malaysia. CIBAFI.

Malaysia International Islamic Financial Centre. (2012). Islamic finance: Malaysia's journey. MIFC Promotions Unit.

Malaysia's Vision towards Becoming the Islamic Finance Global Hub. (2018). Journal of Islamic Finance, 7(2), 1–14.

MIDA. (2024). Malaysia's Banking, Financing and Foreign Exchange Policy Brief.

MIFC Leadership Council. (2025). Term report: Charting Malaysia's next chapter in Islamic finance. Malaysia International Islamic Financial Centre Leadership Council.

Molasy, H. D., & Oktavia, A. (2023). Industri pariwisata Thailand dan kontribusinya terhadap perekonomian nasional. Journal of Mandalika Literature, 6(1), 538–546.

New Straits Times. (2025, 10 Oktober). Islamic Banking Continues to Power Economic Growth.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2024). OJK: Aset industri keuangan syariah naik 11,3 persen secara tahunan. Jakarta: OJK.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2025). Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2025. Jakarta: OJK.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) & Badan Pusat Statistik (BPS). (2024). Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2024. Jakarta: OJK.

- Pongsaparn, R. (2024). Malaysia's strategic path to global Islamic finance leadership. ASEAN+3 Macroeconomic Research Office Insight, 12(4), 1–6.
- Rahim, M. S. B. A. (2025). Revolutionising the Shariah secretariat: Addressing AI related regulatory gaps in Malaysia. Journal of Contemporary Islamic Law Issues, 3(1), 55–72.
- Ramadhan, W. (2025). ZISWAF in neighboring countries: History, characteristics, and challenges. Proceedings of the International Conference on Islamic Economics and Financial Studies, 1(1), 1–15.
- Salam, M. D. A. (2025). Prospects of Islamic finance in Thailand. St. Theresa Journal of Humanities and Social Sciences, 11(1), 35–52.
- Simanjuntak, E. S. J., Prabhawati, A., & Molasy, H. D. (2025). Strategi pariwisata Thailand pada masa pandemi Covid-19: Analisis kerangka 5A Sharron Dickman. Journal of Mandalika Literature, 6(1), 538–546.
- The Malaysian Reserve. (2024, 15 Januari). AEON Digital Bank Launch Marks New Era in Islamic Fintech.
- Wardoyo. (2019). Masyarakat Ekonomi ASEAN: Harapan dan tantangan, bagaimana daya saing Indonesia di ASEAN. Jurnal Manajemen Bisnis, 6(2), 79–87.
- Worasutr, A. (2022). Islamic financial literacy and inclusion in the five southernmost provinces of Thailand. European Journal of Islamic Finance, 21, 1–15.
- World Bank. (2024). Thailand economic update 2024: A fragile recovery.